

Jakarta, 15 Juli 2026

Nomor : 863/AKD.LPKN/TRANSFORMASI-PENGADAAN/VII/2026
Hal : Undangan Bimbingan Teknis Transformasi Pengadaan Indonesia
Lampiran : 4 Halaman

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Pimpinan
Di -
Tempat

Bimbingan Teknis
Transformasi Pengadaan Indonesia
Menjadi Pengadaan Berkelanjutan Minim Risiko

Dengan Hormat,

Pengadaan berkelanjutan menjadi fokus penting dalam praktik pengadaan modern sejak diterbitkannya Sustainable Public Procurement Guidelines oleh UNEP (2012) serta standar ISO 20400:2017 yang mengatur integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam proses pengadaan. Efektivitas pendekatan ini tercermin dalam Global Review 2017, yang menunjukkan bahwa implementasi pengadaan berkelanjutan mampu meningkatkan efisiensi secara signifikan. Di Indonesia, komitmen serupa telah diatur melalui Perpres 16 Tahun 2018 yang dipertegas dengan Perpres 46 Tahun 2025, serta Pedoman Pengadaan Berkelanjutan LKPP Nomor 157 Tahun 2024. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, berbagai instansi pemerintah dan BUMN mulai melakukan transformasi untuk menerapkan pengadaan yang lebih bertanggung jawab dan minim risiko.

Menindaklanjuti hal tersebut maka Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN), akan melaksanakan **Bimbingan Teknis – Transformasi Pengadaan Indonesia Menjadi Pengadaan Berkelanjutan Minim Risiko** dengan metode Tatap Muka, dengan jadwal :

- **Tanggal Kegiatan** : 06 Agustus 2026
- **Waktu Kegiatan** : 08.00 – 17.00 WIB
- **Tempat** : Hotel The Tavia Heritage, Jl. Letjen Suprpto No. 1, Kota Jakarta

Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan tentang ketentuan umum, persiapan, dan pelaksanaan E-purchasing melalui metode ini, tetapi juga untuk membangun kapasitas PPK dan PP dalam mengelola pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, efisien, dan efektif.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Hormat kami,
Ketua Umum
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN)



Andi Zabur Rahman, S.Kom. S.Si., MBA., CHt., MT.NNLP., CPSp., CCMs., CPSt

Bimbingan Teknis
Transformasi Pengadaan Indonesia
Menjadi Pengadaan Berkelanjutan Minim Risiko

A. Latar Belakang

Pada tahun 2012, United Nations Environment Programme mengeluarkan Sustainable Public Procurement Implementation Guidelines. Menurut Guidelines ini, pembangunan berkelanjutan, mengharuskan pemerintah dan organisasi bisnis (BUMN dan swasta) untuk mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dari operasi mereka, tanpa ada aspek tunggal yang mendominasi. Guidelines ini juga mengatur cara menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan untuk pengadaan. 'Pengadaan berkelanjutan' atau Sustainable Public Procurement (disingkat SPP).

Menurut Global Review of Sustainable Public Procurement tahun 2017 (disingkat Global Review 2017) yang dikeluarkan oleh United Nations Environment Programme, **salah satu perusahaan yang berhasil menerapkan pengadaan berkelanjutan (SPP) adalah Microsoft**. Perusahaan ini berhasil mencapai efisiensi dalam belanja pengadaan mereka mencapai rata-rata 20% setiap tahunnya.

Organisasi Internasional untuk Standardisasi (bahasa Inggris: International Organization for Standardization), (bahasa Prancis: Organisation internationale de normalisation) atau disingkat ISO kemudian menerbitkan standar untuk Pengadaan Berkelanjutan, yaitu ISO 20400 Sustainable Procurement – Guidance, yang memberikan pedoman bagi organisasi yang ingin mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam proses pengadaan mereka. Diluncurkan pada bulan April 2017, pengadaan berkelanjutan merupakan aspek utama dari tanggung jawab sosial, sehingga ISO 20400 melengkapi ISO 26000:2010 — Guidance on social responsibility, dengan memungkinkan organisasi berkontribusi pada upaya pembangunan berkelanjutan dengan meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan, menangani masalah hak asasi manusia dan berkontribusi pada masyarakat dan ekonomi.

Ruang lingkup dari ISO 20400 Sustainable Procurement – Guidance adalah memberikan panduan kepada organisasi, terlepas dari aktivitas atau ukurannya, tentang pengintegrasian keberlanjutan dalam pengadaan, sebagaimana dijelaskan dalam ISO 26000.

Di Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga mengatur mengenai pengadaan berkelanjutan. Menurut Pasal 1 angka 50-nya, Pengadaan Berkelanjutan adalah “Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya”.

Menurut ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, “pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan”.

Bimbingan Teknis
Transformasi Pengadaan Indonesia
Menjadi Pengadaan Berkelanjutan Minim Risiko

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga telah mengeluarkan Keputusan Kepala LKPP nomor 157 tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Berkelanjutan.

Dari apa yang disampaikan di atas terlihat bahwa sejak 2012 pengadaan berkelanjutan sudah menjadi tren pelaksanaan pengadaan di berbagai negara di dunia, dan sejak tahun 2017 banyak negara yang mulai menerapkan ISO 20400 – 2017 untuk penerapan pengadaan berkelanjutan, sedangkan di Indonesia dimulai oleh pemerintah pada tahun 2018 khusus untuk pemerintah dengan adanya perintah di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dipertegas kembali dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 46 tahun 2025.

Tren ke depan menunjukan jika pengadaan berkelanjutan ini sudah akan mulai diterapkan oleh berbagai instansi pemerintah dan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa BUMN bahkan sudah mulai melakukan pembentukan tim untuk melakukan transformasi pengadaan di lingkungan mereka menjadi pengadaan berkelanjutan.

B. Materi Pelatihan

1. Seputar Pengadaan Berkelanjutan

- Masa depan Pengadaan global
- Sejarah Pengadaan Berkelanjutan
- Kenapa Pengadaan Berkelanjutan Diperlukan
- ISO 20400 sebagai panduan Pengadaan Berkelanjutan:
 - Prinsip Utama
 - Driver
 - Pertimbangan Utama
 - Cara Mengatur Fungsi Pengadaan, dan
 - Cara Mengintegrasikan ke dalam Proses Pengadaan.

2. Manajemen Risiko Pengadaan Berkelanjutan

- Pertimbangan Utama ISO 20400 terkait Pengelolaan Risiko
- 3 Kegiatan Pengelolaan Risiko Keberlanjutan
- Penilaian Risiko Keberlanjutan
- Decision Impact Analysis
- Life Cycle Cost Analysis
- Risk Register

3. Integrasi dan Implementasi Pengadaan Berkelanjutan

- Integrasi Pengadaan Berkelanjutan
- Implementasi Pada PBJ BUMN
- Modernisasi SOP PBJ
- Alat dan pedoman pada SOP PBJ

4. Indonesia Legal Standing

- Legal Standing pada PBJ Pemerintah

Bimbingan Teknis
Transformasi Pengadaan Indonesia
Menjadi Pengadaan Berkelanjutan Minim Risiko

- Legal Standing pada PBJ BUMN
- Yang harus dilakukan organisasi dalam menerapkan Pengadaan Berkelanjutan

5. Case Study

- Strategic Sourcing Microsoft Dalam Menerapkan Pengadaan Berkelanjutan

C. Durasi Pelatihan

Adapun mengingat materi yang cukup banyak, maka pelatihan disarankan selama **1 (satu) hari penuh (full day)**

D. Trainer

Trainer adalah **Dr. Wawan Zulmawan, SH. MBA. MM. MH.**, yang saat ini merupakan:

- Wakil Ketua Umum II Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia.
- Ketua Dewan Pengawas LBH Pengadaan Publik.
- Wakil Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pengadaan Indonesia.
- Ketua Badan Advokasi, Mediasi, dan Hukum Asosiasi Vendor Indonesia.
- Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Ahli Manajemen Pengadaan.
- Pernah menjadi tenaga ahli pengadaan di berbagai BUMN, dan menjadi VP yang membawahi Unit Pengadaan di anak BUMN.

E. Kualifikasi Trainer

1. Asesor Sertifikasi Profesi Pengadaan (Sertifikasi BNSP)
2. Trainer Training Sertifikasi Profesi Pengadaan (Sertifikasi BNSP)
3. Sudah menerbitkan buku-buku terkait pengadaan dan terkait BUMN sebagai berikut:
 - A. Buku terkait Pengadaan:
 - a. Manajemen Risiko Pengadaan Pemerintah (2019)
 - b. Pengadaan Berkelanjutan Minim Risiko (2019)
 - c. Performance Based Contract Pengadaan Barang/Jasa (2020)
 - d. Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat: Proses, Mitigasi dan Risiko (2020)
 - e. Tingkat Komponen Dalam Negeri Pengadaan Barang/Jasa (2020)
 - f. Manajemen Risiko Hukum Pengadaan Barang/Jasa (2021)
 - g. Menghitung TKDN Barang/Jasa (2022)
 - h. Menghitung TKDN Barang/Jasa Edisi 2023 (2023)
 - i. Panduan Praktis Menghitung TKDN Barang/Jasa dan Industri Kecil (2024)
 - B. Buku Terkait BUMN
 - a. Panduan Praktis Merger atau Akuisisi Perusahaan (2013)
 - b. Panduan Praktis Kerjasama Pendayagunaan Aset BUMN (2013)
 - c. Pendayagunaan Aset BUMN dan Pembentukan Anak Perusahaan (2014)
 - d. Panduan Praktis Kerjasama Aset Pemerintah, TNI dan BUMN (2017)
 - e. Legal Risk Management BUMN (2019)

Bimbingan Teknis
Transformasi Pengadaan Indonesia
Menjadi Pengadaan Berkelanjutan Minim Risiko

- f. Business Judgment Rule BUMN (2019)
 - g. Aturan Penilaian Bisnis BUMN (2021)
 - h. Business Judgment Rule BUMN Pasca UU 1/2025 (2025).
- C. Buku Terkait Pengadaan BUMN:
- a. Best Value for Money Pengadaan Barang/Jasa BUMN (2020)

F. Jadwal Kegiatan

- 1 Hari kegiatan tatap muka
- 06 Agustus 2026
- 08.00 – 17.00 WIB
- Hotel The Tavia Heritage, Jl. Letjen Suprpto No. 1, Kota Jakarta

G. Biaya

- Rp. 2.950.000,- (Tanpa Penginapan)
- Rp. 3.950.000,- (Dengan Penginapan - Twinshare)
- Rp. 4.950.000,- (Dengan Penginapan - Single)

H. Fasilitas

- Mengikuti 1 Hari Kelas Tatap Muka
- Materi pelatihan (softcopy dan hardcopy)
- Peraturan terkait
- Sertifikat Pelatihan
- Tas Ransel dan ATK
- Buku Agenda Eksklusif
- 2x Coffee Break dan Makan Siang
- Dokumentasi Kegiatan
- Penginapan 3 Hari 2 Malam disertai Makan Malam
- (untuk yang menginap Check in H-1, Check Out H+1)
- Doorprize
- Hadiah Undian Akhir Tahun
- 10 Pendaftar Pertama berhak mendapatkan Gratis Buku Pengadaan Berkelanjutan Minim Risiko

Bimbingan Teknis
Transformasi Pengadaan Indonesia
Menjadi Pengadaan Berkelanjutan Minim Risiko

BIODATA PESERTA 1

Nama Lengkap :
Nomor KTP (NIK) :
NIP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Instansi/Unit Kerja :
Email Aktif :
Nomor HP (Wajib WA) :
Pendidikan Terakhir :
Status Kepegawaian :

BIODATA PESERTA 2

Nama Lengkap :
Nomor KTP (NIK) :
NIP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Instansi/Unit Kerja :
Email Aktif :
Nomor HP (Wajib WA) :
Pendidikan Terakhir :
Status Kepegawaian :

Catatan : Formulir bisa diperbanyak sesuai jumlah peserta

Biaya Pelatihan :

- ☐ **Tanpa Menginap**
Rp. 2.950.000,-/Peserta
- ☐ **Dengan Penginapan -**
Twinshare
Rp. 3.950.000,-/Peserta
- ☐ **Dengan Penginapan - Single**
Rp. 4.950.000,-/Peserta

Fasilitas Peserta

- Mengikuti 2 Sesi Kelas Tatap Muka
- Materi pelatihan (softcopy dan hardcopy)
- Peraturan terkait
- Sertifikat Pelatihan
- Template Kerja Pengadaan Rutin
- Tas Ransel dan ATK
- Buku Agenda Eksklusif
- 2x Coffee Break dan Makan Siang
- Dokumentasi Kegiatan
- Doorprize
- Hadiah Undian Akhir Tahun

Pembayaran Dapat Dilakukan secara Transfer ke BANK :

1. BANK BRI : No. Rek : **213501000250301** an. Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional
2. BANK MANDIRI : No. Rek : **0060010942294** an. Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional